

DISKRIMINASI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA MASA ORDE BARU**Resmiyati Yunus,^{1*} Andris K. Malae,²**^{1,2}Prodi Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri GorontaloEmail: resmiyati.yunus@ung.ac.id,¹ andrismaalae@ung.ac.id,²**Abstract**

This study aims to analyze the history of the arrival, life dynamics, and the impact of government policies on the Chinese ethnic group in Gorontalo from the colonial period to the post-Reformation era. The main focus of this research is to understand how migration processes, local community reception, and discriminatory policies during the New Order period influenced the identity, culture, and socio-economic participation of the Chinese community in Gorontalo. The study also highlights the role of the Chinese community in fostering harmony and integration amid ethnic and religious diversity in the region. This research employs a qualitative method with a literature study approach. Data were collected through an in-depth review of books, academic journals, official documents, and historical reports. These secondary sources were supplemented with interviews with informants to enrich the understanding of the local context. The analysis was conducted descriptively and interpretatively, emphasizing the chronology of events, government policies, and the social experiences of the Chinese community in Gorontalo. The research process involved data collection, source selection, verification of source validity, and interpretation to produce a comprehensive understanding. The results indicate that the arrival of the Chinese ethnic group in Gorontalo was influenced by political conditions in their homeland, particularly war and mandatory military service in China. The Chinese community managed to maintain their cultural identity and beliefs despite facing various discriminatory policies during the New Order, such as the prohibition of the Mandarin language, closure of Chinese schools, and restrictions on cultural celebrations. However, Gorontalo proved to be a relatively safe area, with a tolerant local community, so large-scale social conflicts did not occur. In the post-Reformation period, discriminatory policies were revoked, providing the Chinese community with the space to resume cultural traditions and participate widely in social and political life in Indonesia.

Keywords: Chinese Ethnic Group; Gorontalo; New Order**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah kedatangan, dinamika kehidupan, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Gorontalo dari masa kolonial hingga pasca-Reformasi. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana proses migrasi, penerimaan masyarakat lokal, dan kebijakan diskriminatif pada masa Orde Baru memengaruhi identitas, budaya, serta partisipasi sosial-ekonomi masyarakat Tionghoa di Gorontalo. Penelitian ini juga menyoroti peran masyarakat Tionghoa dalam membangun kerukunan dan integrasi di tengah keberagaman etnis dan agama di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui telaah mendalam terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan laporan sejarah terkait. Sumber sekunder ini dilengkapi dengan wawancara informan untuk memperkaya pemahaman konteks lokal. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif, dengan menekankan pada kronologi peristiwa, kebijakan pemerintah, serta pengalaman sosial masyarakat Tionghoa di Gorontalo. Proses penelitian mencakup pengumpulan, seleksi, verifikasi keabsahan sumber, dan interpretasi data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan etnis Tionghoa ke Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi politik di negara asal mereka, khususnya perang dan wajib militer di Cina. Masyarakat Tionghoa mampu mempertahankan identitas budaya dan kepercayaan meskipun menghadapi berbagai kebijakan diskriminatif pada masa Orde Baru, seperti larangan penggunaan bahasa Mandarin, penutupan sekolah Tionghoa, serta pembatasan perayaan budaya. Namun, Gorontalo terbukti menjadi wilayah yang relatif aman, dengan masyarakat lokal yang toleran, sehingga konflik sosial besar tidak terjadi. Pasca-Reformasi,

kebijakan diskriminatif dicabut, memberikan ruang bagi etnis Tionghoa untuk kembali menjalankan tradisi budaya dan berpartisipasi secara luas dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia.

Kata kunci: Etnis Tionghoa; Gorontalo; Orde Baru

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multietnis yang dihuni berbagai kelompok, termasuk etnis Tionghoa, yang memiliki kontribusi besar terhadap budaya dan ekonomi lokal. Salah satu simbol budaya etnis Tionghoa peranakan di Semarang adalah lumpia, yang bukan hanya sebagai makanan tetapi juga sebagai identitas budaya yang menguatkan ikatan sosial komunitas tersebut (Susanti, 2015).

Namun, pada masa Orde Baru, etnis Tionghoa di Indonesia menghadapi diskriminasi sistematis dari pemerintah. Kebijakan yang diterapkan bertujuan menghilangkan identitas budaya Tionghoa, termasuk pelarangan penggunaan bahasa Mandarin, penutupan sekolah Tionghoa, pembatasan perayaan budaya, dan penggantian nama yang bernuansa Tionghoa (Fitrya, 2013; Aryani, 2022). Kondisi ini menimbulkan masa kelam bagi etnis Tionghoa, membatasi ruang gerak sosial, ekonomi, dan politik mereka, serta memengaruhi kehidupan sehari-hari komunitas Tionghoa di berbagai daerah seperti Madiun, Makassar, Gorontalo, dan Siak Sri Indrapura (Afiyanto, 2019; Nurhayati & Aksa, 2020; Latif, Yulan, & Malae, 2022; Manungkalit, 2023).

Diskriminasi yang terjadi juga berdampak pada identitas dan persepsi masyarakat Tionghoa terhadap status mereka di Indonesia. Istilah "Tionghoa" menggantikan "Cina" pada masa Orde Baru, sebagai upaya pemerintah menegaskan perubahan identitas dan mengintegrasikan komunitas ini ke dalam

masyarakat Indonesia (Susetyo, 2002). Meskipun terjadi pembatasan, sebagian masyarakat Tionghoa mampu melakukan asimilasi dalam bidang ekonomi dan budaya sambil tetap mempertahankan kepercayaan agama dan adat-istiadat mereka (Pratama, 2016; Nurhayati & Aksa, 2020; Zamroni & Purwaningsih, 2019).

Kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi: di satu sisi, etnis Tionghoa mengalami tekanan sosial dan diskriminasi; di sisi lain, mereka tetap memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, budaya, dan kerukunan sosial di Indonesia. Fenomena ini menjadi fokus penelitian untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan dinamika sosial memengaruhi eksistensi etnis Tionghoa pada masa Orde Baru.

Harus di akui bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan dihuni oleh masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang etnis, termasuk etnis Tionghoa. Sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia memiliki kekayaan adat dan budaya yang sangat beragam. Namun, keberagaman tersebut tidak jarang memunculkan konflik sosial serta praktik diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi adalah perlakuan tidak adil dari masyarakat adat terhadap etnis Tionghoa (Leovandita Eka Jati & Agus Trilaksana, 2013).

Masa pemerintahan Orde Baru menjadi periode yang paling menekan bagi kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada masa tersebut, mereka mengalami berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang menimbulkan trauma mendalam akibat kondisi kehidupan yang serba terbatas dan penuh tekanan.

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Era Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998, ketika kepemimpinan nasional beralih kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada periode ini, Indonesia mengalami perkembangan dalam bidang ekonomi, namun di sisi lain praktik korupsi juga berkembang secara luas.

Situasi politik Indonesia pada tahun 1966 berada dalam kondisi tidak stabil akibat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Seiring dengan perubahan politik tersebut, pemerintah Orde Baru menetapkan larangan terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan etnis Tionghoa. Larangan ini mencakup aspek keagamaan, kepercayaan, serta adat istiadat masyarakat Tionghoa. Kebijakan tersebut secara resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967.

Situasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) ditandai oleh ketidakstabilan yang signifikan, akibat perubahan kebijakan politik, perebutan kekuasaan, dan konflik ideologi antara berbagai kelompok politik, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) dan militer (Arta, 2022;

Kusmayadi, 2017). Ketidakstabilan ini diperparah oleh krisis sosial-ekonomi yang semakin memburuk pada pertengahan tahun 1960-an, terutama menjelang peristiwa 1965, yang memicu ketegangan di masyarakat dan melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional (Romadhan & Asri, 2024; Akmaliah, 2015).

Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia juga memainkan peran penting, terutama selama Konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963–1966), yang menambah kompleksitas dinamika politik dalam negeri dan menuntut perhatian besar dari pemerintah pusat (Kusmayadi, 2017). Pergolakan politik domestik terjadi bersamaan dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto, yang kemudian diresmikan melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), menandai dimulainya era Orde Baru (Apandi, Cahyani, & Sari, 2025).

Kondisi politik dan sosial-ekonomi yang tidak stabil pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1966) menjadi latar penting untuk memahami pengalaman kelompok etnis minoritas, khususnya etnis Tionghoa, yang mulai merasakan pembatasan sosial, ekonomi, dan budaya bahkan sebelum Orde Baru sepenuhnya diterapkan (Fadli & Kumalasari, 2019). Ketidakstabilan ini menciptakan tekanan bagi masyarakat Tionghoa serta kelompok etnis lainnya, yang menjadi salah satu faktor pemicu diskriminasi sistematis dan pembatasan ruang gerak komunitas Tionghoa pada periode berikutnya. Berdasarkan konteks tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini diformulasikan pada dua hal utama: pertama,

kedatangan dan persebaran etnis Tionghoa di Indonesia; dan kedua, diskriminasi, kebijakan Orde Baru, serta dinamika kehidupan sosial-ekonomi dan budaya etnis Tionghoa di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) karena fokusnya adalah memahami fenomena historis dan sosial yang kompleks, yakni kedatangan, persebaran, serta dinamika kehidupan etnis Tionghoa di Gorontalo dari masa kolonial hingga pasca-Reformasi. Metode kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap pengalaman komunitas Tionghoa, dampak kebijakan diskriminatif pada masa Orde Baru, dan adaptasi sosial-ekonomi mereka dalam konteks lokal, tanpa terbatas pada data kuantitatif.

Pendekatan ini sejalan dengan teori Assyakurrohim, Ikhrum, & Sirodj (2022), yang menyatakan bahwa metode studi kasus dan library research sangat relevan untuk penelitian kualitatif karena dapat menelusuri pengalaman subjektif, konteks historis, dan interaksi sosial dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Dengan library research, peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber tertulis, termasuk buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, laporan sejarah, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan komunitas Tionghoa, sebagaimana dijelaskan oleh Ilhami, Nurfajriani, & Mahendra (2024). Studi literatur juga memperkuat landasan teoritis, menelusuri tren penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi kesenjangan

pengetahuan yang menjadi fokus penelitian, sesuai temuan Putri, Budianto, & Dewi (2023). Lebih jauh, Safarudin, Zulfamanna, & Kustati (2023) menekankan bahwa library research relevan untuk menafsirkan data historis dan sosial, karena memungkinkan peneliti memetakan kronologi peristiwa, kebijakan pemerintah, dan dampaknya terhadap identitas budaya etnis minoritas.

Selain itu, tinjauan kepustakaan menurut Mahanum (2021) menegaskan bahwa library research mendukung analisis kritis terhadap literatur, sehingga penelitian ini mampu menghadirkan gambaran komprehensif tentang pengalaman sosial-ekonomi dan kultural etnis Tionghoa di Gorontalo. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif berbasis studi literatur menjadi strategi yang tepat untuk memahami proses historis, diskriminasi, dan adaptasi komunitas Tionghoa secara sistematis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedatangan dan Persebaran Etnis Tionghoa di Indonesia

Kedatangan imigran Cina ke Indonesia telah berlangsung lebih dari satu abad yang lalu. Pola migrasi awal menunjukkan bahwa mereka datang secara bertahap dalam kelompok kecil, bahkan tidak jarang secara individu. Hingga akhir abad ke-18, jumlah perempuan Cina yang ikut bermigrasi masih sangat terbatas. Kondisi ini mulai berubah pada abad ke-20, ketika arus imigrasi meningkat secara signifikan dan melibatkan jumlah pendatang yang lebih besar. Sebagian besar imigran tersebut berasal dari dua wilayah utama, yaitu Provinsi Fujian

(Hokkien) dan Guangdong (Kanton). Para pendatang ini kemudian menetap dan menyebar di berbagai wilayah Nusantara, seperti Kalimantan Barat, Deli, Bangka, Belitung, Riau, dan Pulau Jawa (Yuni Maryuni, 2019).

Secara umum, etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Nusantara berasal dari wilayah selatan Cina, antara lain Guangdong, Fujian, dan Guangxi. Dari daerah-daerah tersebut lahir kelompok-kelompok besar perantau Tionghoa di Asia Tenggara, seperti Hokkien, Teochiu, Kanton, Hakka, dan Hainan. Kelompok-kelompok ini dikenal memiliki kemampuan kuat dalam mempertahankan identitas budaya dan kepercayaan mereka. Ajaran Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme menjadi pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat Tionghoa, meskipun terdapat pula di antara mereka yang memeluk agama Islam (Dahana, 2000).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia dipengaruhi oleh kondisi politik internasional, khususnya konflik antara Cina dan Jepang. Serangan Jepang terhadap Cina mendorong pemerintah Cina pada saat itu untuk mengizinkan warganya bermigrasi ke luar negeri, sehingga terjadi gelombang imigrasi besar-besaran, termasuk ke Indonesia dan wilayah Gorontalo. Kedatangan etnis Tionghoa ke Gorontalo umumnya bertujuan untuk berdagang dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

Menyikapi hal itu, Kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan fenomena yang memiliki dampak signifikan terhadap

perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah Nusantara. Berdasarkan kajian literatur, kedatangan etnis Tionghoa tidak hanya membawa keahlian perdagangan, tetapi juga memperkenalkan praktik budaya dan ritual yang kemudian menjadi bagian dari identitas lokal. Sebagai contoh, di Bagansiapiapi, etnis Tionghoa peranakan turut membentuk ritual Bakar Tongkang yang kini menjadi budaya lokal yang dikenal luas (Aini & Yuni, 2025). Pemetaan sosial-politik menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia memiliki jaringan sosial yang kompleks, terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, dan budaya, serta membangun integrasi dengan masyarakat pribumi (Marzali, 2011).

Masyarakat lokal umumnya menerima kedatangan imigran Tionghoa dengan terbuka, meskipun terdapat beberapa resistensi akibat perbedaan budaya dan persaingan ekonomi (Sujana & Wardah, 2020). Diaspora etnis Tionghoa juga terlihat di Kabupaten Ciamis, di mana kedatangan mereka berhubungan dengan peluang ekonomi, seperti pembukaan perkebunan di Priangan Timur, yang kemudian memengaruhi pola permukiman dan struktur sosial setempat (Shanti, Retnaningtiyas, & Sa'adah, 2022). Selain itu, koalisi antara Tionghoa dan pribumi pada peristiwa Perang Kuning menunjukkan bahwa kedatangan mereka juga berkontribusi pada dinamika politik lokal, membentuk solidaritas lintas etnis untuk melawan penjajahan Belanda (Kristiyanto & Suhassatya, 2026).

Persebaran komunitas Tionghoa di wilayah lain, seperti Palembang, Tangerang, dan Bandar Lampung, menunjukkan pola

adaptasi budaya yang beragam, termasuk pembauran dengan masyarakat lokal dan pembentukan identitas keagamaan unik, seperti Muslim Cina Benteng di Tangerang (Amirullah, 2023; Habiburrohman, 2022; Arif & Ekwandari, 2020). Studi sejarah juga menyoroti bagaimana diskriminasi dan stereotip etnis memengaruhi eksistensi sosial mereka, namun sebagian besar komunitas mampu mempertahankan identitas budaya dan sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia (Wirawan, 2020; Suryaningtyas, 2018). Dari berbagai literatur ini, dapat disimpulkan bahwa kedatangan dan persebaran etnis Tionghoa telah membentuk dinamika sosial-budaya yang kompleks, dengan interaksi antara identitas etnis, praktik budaya, dan integrasi masyarakat lokal.

Diskriminasi, Kebijakan Orde Baru, dan Dinamika Etnis Tionghoa

Pada dekade 1950-an, pemerintah Indonesia mulai menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Salah satu kebijakan tersebut adalah “Strategi Benteng”, yang pada praktiknya mempersempit ruang gerak masyarakat Tionghoa dalam bidang ekonomi dan sosial. Kebijakan ini kemudian berkembang menjadi larangan terhadap aktivitas perdagangan dan pemukiman masyarakat Tionghoa di tingkat daerah. Memasuki pertengahan 1960-an, kondisi perekonomian nasional yang memburuk menjadikan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang rentan dimanfaatkan dalam konflik politik Perang Dingin. Kerusuhan yang terjadi pada tahun 1965–1966 di berbagai kota besar seringkali

menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran, meskipun sebagian besar kekerasan tersebut sebenarnya ditujukan kepada kelompok yang dicurigai berhaluan sosialis (Justian Suhandinata, 2009).

Kesalahpahaman internasional terhadap peristiwa tersebut diperkuat oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang membatasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Tionghoa. Berbagai unsur budaya Tionghoa, seperti pertunjukan seni, perayaan tradisional, penggunaan aksara Cina, serta ekspresi budaya lainnya, dinyatakan ilegal. Pemerintah juga mendorong masyarakat Tionghoa untuk mengganti nama mereka dengan nama bernuansa lokal sebagai bagian dari kebijakan asimilasi.

Kebijakan diskriminatif ini semakin diperkuat dengan pelarangan penggunaan bahasa Mandarin, pembatasan perayaan budaya, serta pembatasan akses etnis Tionghoa ke bidang politik, pemerintahan sipil, dan militer. Kondisi tersebut membatasi peran masyarakat Tionghoa hanya pada sektor ekonomi komersial. Akibatnya, etnis Tionghoa semakin terpinggirkan dari kehidupan sosial masyarakat luas dan diposisikan sebagai kelompok “outsider” (Irine Hiraswari Gayatri et al., 2019).

Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, masyarakat Tionghoa mengalami pemisahan yang sistematis. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan ini secara resmi tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 yang melarang pelaksanaan berbagai kegiatan budaya Tionghoa, seperti perayaan keagamaan, lagu-

lagu tradisional, serta adat istiadat Tionghoa. Pemerintah juga menutup sekolah-sekolah Tionghoa, yang berdampak langsung pada hilangnya penggunaan dan pengajaran bahasa Mandarin. Kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh etnis Tionghoa di Gorontalo, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia (Resmiyati Yunus, 2019).

Penutupan sekolah Tionghoa di Gorontalo berlangsung lebih lama dibandingkan daerah lain. Jika di Pulau Jawa penutupan sekolah Tionghoa terjadi sejak peristiwa G30S/PKI tahun 1965, maka di Gorontalo sekolah tersebut baru sepenuhnya ditutup pada tahun 1996. Menariknya, kerusuhan anti-Tionghoa pada tahun 1998 yang melanda wilayah Jawa tidak berdampak signifikan di Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat Gorontalo yang terbuka dan mudah berbaur, sehingga mampu menjaga kerukunan tanpa memandang perbedaan ras dan agama (Lola Agnes Moniaga, 2021).

Meskipun Gorontalo merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, tidak pernah tercatat konflik besar yang berlatar belakang agama atau diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Ikatan etnis dalam komunitas Tionghoa justru terbentuk kuat dan seringkali melampaui ikatan keagamaan.

Pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, kehidupan etnis Tionghoa mengalami perubahan signifikan. Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo menjadi titik balik bagi masyarakat Tionghoa untuk memperjuangkan pengakuan dan kesetaraan hak sebagai warga negara. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan-kebijakan

diskriminatif terhadap etnis Tionghoa dicabut, termasuk larangan perayaan Imlek yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional. Periode reformasi membuka ruang baru bagi masyarakat Tionghoa untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia (Olivia, 2021; Mohammad Zaenal & Retno Winarni, 2017).

Hal lain juga menunjukkan bahwa, Masa Orde Baru (1966–1998) menandai periode yang penuh tantangan bagi komunitas etnis Tionghoa di Indonesia, yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan identitas budaya maupun sosial-ekonomi. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah Inpres No. 14 Tahun 1967 yang membatasi penggunaan bahasa Mandarin, penutupan sekolah Tionghoa, serta pelarangan sejumlah praktik budaya tradisional, yang secara sistematis mengurangi ruang gerak komunitas Tionghoa dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Aryani, 2022). Kebijakan asimilasi yang diterapkan pemerintah Orde Baru menekankan loyalitas politik etnis Tionghoa terhadap rezim, namun dalam praktiknya kerap bersifat diskriminatif, membatasi ekspresi budaya, dan menimbulkan stigma sosial terhadap kelompok ini (Chessiagi, Darmawan, & Ma'mur, 2018; Eriyanti, 2006).

Dampak dari kebijakan tersebut juga terlihat dalam dinamika sosial dan politik etnis Tionghoa. Diskriminasi sistemik, baik dalam bentuk legal maupun sosial, menyebabkan etnis Tionghoa harus menyesuaikan strategi bertahan hidup, termasuk melalui pembauran budaya atau partisipasi ekonomi yang terbatas

(Cahyaningtiyas & Putra, 2020; Sibawati, 2024). Fenomena rasisme dan kekerasan, seperti yang dialami perempuan etnis Tionghoa selama kerusuhan Mei 1998, menegaskan betapa ketidaksetaraan dan tekanan sosial berlangsung hingga menjelang akhir Orde Baru (Anggraeni & Purwaningsih, 2022). Meski demikian, etnis Tionghoa tetap mempertahankan identitas budaya dan membangun jaringan sosial untuk bertahan, menunjukkan ketahanan sosial dan budaya yang signifikan (Susanto, 2023; Suryani & Azmy, 2020).

Beberapa studi juga mencatat bahwa pasca-Orde Baru, perubahan kebijakan politik dan hukum memungkinkan etnis Tionghoa kembali mengekspresikan budaya dan identitas sosialnya, sekaligus berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik nasional. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun mengalami diskriminasi berat, dinamika etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi dan perlawanan terhadap pembatasan yang diterapkan pemerintah selama Orde Baru (Setiawan, Yudi Prasetyo, & Fajriyah, 2019). Dari perspektif ini, analisis literatur menekankan bahwa diskriminasi Orde Baru membentuk pengalaman historis yang penting dalam memahami interaksi etnis, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia.

SIMPULAN

Kedatangan etnis Cina/Tionghoa ke Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah yang terjadi di negara asal mereka. Konflik dan peperangan yang

berlangsung di Cina pada masa itu mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti wajib militer. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendorong sebagian warga Cina untuk meninggalkan negaranya dan mencari kehidupan yang lebih aman dan layak di luar negeri. Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Gorontalo pada awalnya berasal dari Manado. Mereka merupakan kelompok yang berupaya menghindari wajib militer dengan melarikan diri ke Makassar, namun dalam perjalanannya akhirnya menetap di Gorontalo.

Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Tionghoa pada masa tertentu telah melahirkan praktik diskriminasi rasial. Pemaksaan agar keturunan Tionghoa sepenuhnya menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia berdampak pada hilangnya ruang bagi mereka untuk mempertahankan identitas dan kepribadian budaya. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Tionghoa memiliki hak yang sama untuk menjalankan adat istiadat dan kepercayaan sebagaimana suku dan kelompok etnis lainnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara multietnis, keberagaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan seharusnya diterima, dihargai, serta dijunjung tinggi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR RUJUKAN

Afiyanto, H. (2019). Menjejak keseharian etnis Tionghoa Madiun 1966'an-2000'an. Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah. <https://jurnal.untirta.ac.id>

- Aini, N., & Yuni, R. (2025). Kedatangan etnis Tionghoa yang mempengaruhi budaya lokal di Bagansiapiapi. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*.
<https://ejournals.com/xxxx>
- Akmaliah, W. (2015). Indonesia yang dibayangkan: Peristiwa 1965–1966 dan kemunculan eksil Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*.
<https://ejournal.brin.go.id>
- Amirullah, A. (2023). Sejarah perkembangan etnis Tionghoa Muslim Palembang. Soeloeh Melajoe: *Jurnal Magister Peradaban*.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/xxxx>
- Anggraeni, S., & Purwaningsih, S. M. (2022). Kekerasan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di Surabaya. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/xxxx>
- Apandi, A., Cahyani, A. R., & Sari, F. R. (2025). Dinamika politik dan militer di Indonesia dalam konteks pemberontakan dan peralihan kekuasaan (1946–1965). *Journal of Indonesian Social*.
<https://journal.unnes.ac.id>
- Arif, S., & Ekwandari, Y. S. (2020). Pola permukiman etnis Tionghoa di Bandar Lampung: Suatu tinjauan historis. *Repository LPPM, Universitas Lampung*.
<https://repository.unila.ac.id/xxxx>
- Armiwulan, H. (2016). Gender responsive. [Penerbit Tidak Disebutkan].
- Arta, K. S. (2022). Situasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 1959–1966. Candra Sangkala: *Jurnal Pendidikan Sejarah*. [tautan mencurigakan telah dihapus]
- Aryani, M. K. (2022). Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk diskriminasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*.
<https://online-journal.unja.ac.id/xxxx>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., & Sirodj, R. A. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *ResearchGate*.
<https://www.researchgate.net/publication/xxxx>
- Aziz, M. (2013). Identitas pemuda Tionghoa pasca reformasi: Nasionalisme dalam transformasi kepemimpinan pada organisasi sosial di Lasem, Jawa Tengah. *Jurnal Studi Pemuda*, 2(2).
- Cahyaningtyas, I. A., & Putra, C. R. W. (2020). Diskriminasi terhadap etnik Tionghoa dalam novel Entrok karya Okky Madasari. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*.
<https://jurnal.umk.ac.id/xxxx>
- Chessiagi, L., Darmawan, W., & Ma'mur, T. (2018). Dinamika kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa dalam bingkai kebijakan asimilasi Orde Baru (1966–1998). *FACTUM: Jurnal Sejarah*.
<https://ejournal.upi.edu/xxxx>
- Dahana, A. (2000). Kegiatan awal masyarakat Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Wacana*, 2(1).
- Eriyanti, F. (2006). Dinamika posisi identitas etnis Tionghoa dalam tinjauan teori identitas sosial. *Demokrasi*.
<https://neliti.com/xxxx>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama (periode 1945–1966). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pendidikan*.
<https://academia.edu>
- Fittrya, L. (2013). Tionghoa dalam diskriminasi Orde Baru tahun 1967–2000. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*.
<https://ejournal.unesa.ac.id>
- Gayatri, I. H., dkk. (2019). Tionghoa dan keindonesiaan: Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Habiburrohman, M. (2022). Pembentukan identitas etnis dan keagamaan masyarakat Muslim Cina Benteng di Tangerang, Banten. *Jurnal Thaqafiyat*.
<https://researchgate.net/xxxx>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., & Mahendra, A. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal*

- Ilmiah Wahana.
<https://jurnal.peneliti.net/xxxx>
- Jati, L. E., & Trilaksana, A. (2013). Undang-undang anti diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada tahun 1998–2008. *Jurnal Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2).
- Kristiyanto, A. A. D., & Suhassatya, G. K. (2026). Persatuan Indonesia: Bersatunya etnis Tionghoa dengan kaum pribumi–Jawa dalam peristiwa Perang Kuning. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*.
<https://journal.fexaria.com/xxxx>
- Kusmayadi, Y. (2017). Politik luar negeri Republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963–1966. *Jurnal Artefak*.
<https://jurnal.unigal.ac.id>
- Latif, F. R., Yulan, Y., & Malae, A. K. (2022). Diskriminasi etnis Tionghoa di Gorontalo masa Orde Baru. *Jambura History and Culture Journal*.
<https://ejurnal.ung.ac.id>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. ALACRITY: Journal of Education.
<https://lppppublishing.com/xxxx>
- Manungkalit, N. (2023). Aktivitas perekonomian etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura pada masa Orde Baru (1966–1998). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.
<https://journals.usm.ac.id>
- Maryuni, Y. (2019). Terbukanya kran demokrasi etnis Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan “Jendela Pengetahuan”*, 6.
- Marzali, A. (2011). Pemetaan sosial-politik kelompok etnik Cina di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*.
<https://neliti.com/xxxx>
- Nurhayati, N., & Aksa, A. (2020). Tionghoa (Muslim) di Makassar: Studi atas pembaurannya dalam bidang budaya dan ekonomi pada masa Orde Baru. *Yupa: Historical Studies Journal*.
<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id>
- Olivia. (2021). Ringkasan umum kebudayaan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kanisius.
- Pratama, A. (2016). Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
<https://jurnal.unsil.ac.id>
- Putri, S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Bank Bukopin Syariah dan Konvensional: Studi pustaka (library research) dan bibliometrik VOSviewer. Academia.edu.
<https://www.academia.edu/xxxx>
- Romadhan, F., & Asri, Z. (2024). Ketidakstabilan politik Indonesia tahun 1959–1966. *Jurnal Kronologi*.
<https://kronologi.ppi.unp.ac.id>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., & Kustati, M. (2023). Penelitian kualitatif. *J-Innovative Science Research*. <https://j-innovative.org/xxxx>
- Setiawan, Y., Yudi Prasetyo, S. S., & Fajriyah, I. (2019). Dinamika kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo tahun 1998–2019. *Repository Universitas PGRI Delta*.
<https://repository.universitaspgridelta.ac.id/xxxx>
- Shanti, D. R., Retnaningtiyas, W., & Sa’adah, I. N. (2022). Etnis Tionghoa di Kabupaten Ciamis: Diaspora dan dinamika permukimannya pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. *PURBAWIDYA: Jurnal Sejarah*.
<https://ejournal.brin.go.id/xxxx>
- Sibawati, I. (2024). Eksistensi etnis Cina di bawah pemerintahan Orde Baru, 1966–1998. *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Budaya*. <https://ejournal.ahs-edu.org/xxxx>
- Suhandinata, J. (2009). WNI keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. *Gramedia Pustaka Umum*.
- Sujana, A. M., & Wardah, E. S. (2020). Etnis Tionghoa: Pluralisme dan regulasi birokrasi di Indonesia. *Alur Sejarah*. [Data jurnal tidak lengkap pada sumber asli].
- Suryani, S., & Azmy, A. S. (2020). Identitas politik dan multikulturalisme:

- Penguatan identitas politik etnis Tionghoa pasca Orde Baru. Perspektif. <https://ojs.uma.ac.id/xxxx>
- Susanti, I. E. (2015). Lumpia Semarang pada masa Orde Baru (Lumpia sebagai identitas budaya etnis Tionghoa peranakan Semarang). *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Susanto, A. A. (2023). Partisipasi politik etnik Tionghoa: Tantangan dan hambatan. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*. <https://pkns.portalapssi.id/xxxx>
- Susetyo, D. B. (2002). Krisis identitas etnis Cina di Indonesia. *Psikodimensia-Kajian Ilmiah Psikologi*. <https://www.researchgate.net>
- Yunus, R. (2019). Pembauran etnis Tionghoa dan Gorontalo pada sektor ekonomi ditinjau dalam perspektif sejarah. *Jambura History and Culture Journal*, 1(1).
- Zaenal, M., & Winarni, R. (2017). Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Kota Malang tahun 1967–2000. *Jurnal Publika Budaya*, 5(2).
- Zamroni, M. M., & Purwaningsih, S. M. (2019). Islamisasi masyarakat Tionghoa Surabaya masa Orde Baru. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*. <https://ejournal.unesa.ac.id>